

**PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
DALAM BINGKAI MORAL
SEBAGAI STRATEGI *BROAD BASED EDUCATION***

**Oleh: Saefur Rochmat dan Bambang S. Hadi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta**

Abstract:

Up to now, our educational system have not succeeded in increasing the quality of manpower, in which we are in the 132nd in the world, one level below Vietnam, a nation which is just out of the internal dissent. It happens because Indonesia follows the educational system of the West minus its cultural aspect. The impacts will be more disaster if the educational process only emphasis on the cognitive aspect of it, moreover if it is reduced into the memory aspect.

If we give Broad Based Education (BBE) the meaningful, it will be able to overcome some disabilities of our educational system. The BBE programs launching together with the policy of the Local Autonomy give all districts the opportunities to set up their educational system regionally in accordance with their culture. Educational system should relevant to their philosophical, as the system of knowledge of their societies, which consist of all symbols with their concepts of epistemology to integrate the process of modernization into a coherent system. If the educational system is given the appropriate cloth in accordance with the culture of the nation it will run well, besides as an alternative to the secular education of the West which is not able to produce the wisdom.

We can take all the theories and concepts of the West to be applied into the situation and condition in Indonesia so that the results of education are useful to cope all problems which exist in our societies. We should also lead education process up to the evaluation level in accordance with the culture and morality of our nation.

Key words: manpower, education, culture, modernization, and evaluation.

Pendahuluan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sangat rendah nomor 132 di dunia, satu tingkat di bawah Vietnam, suatu negara yang baru keluar dari konflik dalam negeri dan belum lama merdeka, merupakan akibat dari sistem pendidikan yang tidak memadai, ilmu-ilmu yang diajarkan dilepaskan dari filsafat bangsa sendiri. Padahal, filsafat bangsa merupakan spirit dan sekaligus menjadi standar nilai bagi pendidikan suatu bangsa. Dengan demikian, mata pelajaran yang diajarkan selama ini cenderung sebagai suatu produk dari peradaban Barat, yang terlepas dari baju filsafatnya namun tidak diganti dengan baju filsafat bangsa kita sendiri.

Dewasa ini ilmu-ilmu yang diajarkan cenderung mengembangkan aspek keterampilan dan aspek intelektual saja, dan tidak mengembangkan pendidikan moral secara memadai. Orientasi pendidikan seperti ini jelas sekali bertentangan dengan orientasi sistem pendidikan Islam yang menghargai pendidikan moral sebagai inti dari pendidikan itu sendiri. Hendaknya sistem pendidikan mengacu kepada sistem pendidikan Islam yang mempunyai seperangkat ajaran dan moral universal yang komprehensif, hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, disamping pentingnya pendidikan moral telah menjadi perhatian semua agama.

Dalam pendidikan di Indonesia sekarang ini terlihat bahwa pengembangan aspek keterampilan mendapat porsi yang besar dalam pendidikan keterampilan (teknik) dan ilmu-ilmu alam, yang mempunyai sasaran menundukkan dunia bagi kemudahan dan kesenangan hidup manusia di dunia ini. Materi pendidikannya adalah bagaimana cara menghasilkan suatu produk (barang-barang) yang dapat mempermudah kehidupan manusia di dalam usahanya untuk mengatasi keganasan alam. Ilmu-ilmu alam ini, dan dalam kadar tertentu pendidikan keterampilan, juga mengembangkan aspek intelektual. Sementara itu, pengembangan aspek intelektual sangat menonjol

dalam ilmu-ilmu humaniora, yaitu ilmu yang menjadikan manusia sebagai obyek kajiannya. Pengembangan aspek intelektual ini sangat penting di dalam pendidikan, baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu humaniora, tetapi hal itu bukanlah inti dari pendidikan itu sendiri. Pengembangan aspek intelektual ini terbatas bagi mereka yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, disamping fakta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang kurang mengandalkan pada kemampuan intelektual tersebut.

Konsep pendidikan yang hanya mengembangkan aspek keterampilan dan intelektual jelas tidak komprehensif, karena sistem pendidikan semacam itu tidak memperhatikan pendidikan bagi mereka yang memiliki pembawaan IQ rendah. Sistem pendidikan semacam ini juga dapat menimbulkan perasaan frustrasi pada anak didik yang selalu dituntut secara intelektual dan tidak memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan non-intelektualitas, seperti moralitas dan seni dan kemandirian/tanggung jawab.

Mereka yang memiliki IQ rendah perlu diperhatikan juga agar dapat memiliki peran maupun mengemban tanggung jawab kemasyarakatan sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan tanggung jawab perlu diperkenalkan dalam sistem pendidikan kita karena inilah pendidikan yang benar-benar berpusat pada anak didik. Anak didik diarahkan dalam belajarnya dengan pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Selanjutnya, anak diberi kebebasan untuk menentukan minat studinya dan mengembangkan peran sosial yang sesuai dengan kemampuannya. Di sini diperkenalkan keseimbangan antara kemampuan intelektual dan tanggung jawab, yang menjamin bagi tertib sosial.

Implementasi kurikulum 2004 ini diharapkan dapat mengatasi krisis nilai di dalam sistem pendidikan kita sekarang ini. *Broad Based Education* (BBE) diharapkan dapat merombak kecenderungan kurikulum selama ini yang sentralistik (karena disusun oleh pemerintah pusat) dengan kurikulum bermuatan lokal. Peluang untuk menerapkan BBE secara benar semakin besar dengan dikeluarkannya kebijakan politik UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pada tulisan ini akan dibahas secara sederhana mengenai keterkaitan pendidikan keterampilan dan pendidikan moral untuk mendukung BBE.

Sistem Pendidikan dalam Krisis Moral

Akar dari kegagalan pendidikan di Indonesia karena sistem pendidikan kita mengekor kepada sistem pendidikan Barat yang terlampau menekankan aspek akal dan empiris dengan tujuan untuk menguasai alam. Pendidikan diupayakan untuk mengembangkan intelektual (akal) dan keterampilan (empiris). Dengan mengembangkan iptek, Barat telah berhasil mewujudkan peradaban yang maju secara material. Akan tetapi, secara immaterial, peradaban Barat belum dapat melahirkan kebijaksanaan sehingga masih banyak permasalahan kemanusiaan yang belum dapat diselesaikan. Bila kita mengikuti jalan modernisasi Barat tanpa kritik, krisis peradaban Barat juga akan menimpa Indonesia, bahkan dampaknya lebih buruk lagi karena kita belum terbiasa untuk membudayakan demokrasi dan hukum legal formal, di samping kita akan tercabut dari akar tradisi sendiri.

Pendidikan yang melahirkan kebijaksanaan tidak lahir di Barat karena pendidikan etika didasarkan pada pertimbangan rasio, empiris, dan fakta sosial dari tradisi. Mereka tidak percaya lagi pada peran agama sebagai sumber dari segala moralitas, karena mereka berkeyakinan kalau era agama sudah berakhir, dimana agama hanya berperan sebagai masa transisi antara era mitos dan era modern (ilmu pengetahuan dan teknologi). Fondasi kebenaran diletakkan pada pertimbangan akal dan *sensate system of truth* (kebenaran inderawi), sehingga tidak dapat melahirkan kebijaksanaan karena 'kebenaran' itu di bawah kendali mereka yang punya kekuasaan (Maarif, 1994: 1-4). Mereka yang sudah berhasil mengembangkan pemikiran akal dan *sensate system of truth* yang lebih maju akan mendiktekan 'kebenaran' yang diyakininya; padahal kebenaran di dunia ini bersifat relatif karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta sejarah perkembangan dari suatu komunitas. Lain halnya, bila fondasi kebenaran juga didasarkan pada pertimbangan hati, akan dapat melahirkan kebijaksanaan karena siapa pun, baik orang pintar ataupun bodoh, memiliki perkembangan hati yang relatif sama, bahwa semua orang dapat merasakan dualisme perasaan seperti suka dan sedih sekaligus.

Memang dalam kadar tertentu Barat menggunakan tradisi sebagai sumber dari etika. Akan tetapi, tradisi hanya dipandang sebagai sesuatu realita yang

dapat diamati, berisi tentang kebenaran yang diterima secara umum oleh suatu komunitas tertentu. Mereka melihat tradisi tidak secara utuh karena hanya melihat tradisi sebagai produk (fakta sosial) dan tidak melihat tradisi sebagai suatu proses yang mengalami lahir, tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Kita dapat mengetahui baik dan buruk berdasarkan akal dalam membaca situasi sosial yang ada di dalam masyarakat, namun hal tersebut hanya sebatas pada kemampuan untuk menerangkan tradisi sebagai fakta sosial dan tidak sampai pada usaha mengerti (*verstehen*) terhadap psikologi dari tradisi tersebut.

Bila dipikirkan secara mendalam, situasi sosial (tradisi) tersebut merupakan produk dari ajaran agama (Mukti Ali, 1971: 7). Tradisi mewakili nilai-nilai di dalam suatu masyarakat yang diterima sebagai kebenaran, setelah melalui proses dialogis di antara berbagai nilai-nilai dari anggota masyarakat yang plural tersebut. Nilai-nilai yang dikonteskan tersebut berasal dari agama, atau lebih tepatnya lagi pemahaman keagamaan anggota masyarakat yang plural tersebut.

Di Barat krisis moral secara internal tidak terlalu berdampak pada peran dominan peradabannya, tetapi secara eksternal berdampak luas pada tatanan dunia yang cenderung membela kepentingannya dan menafikan kepentingan kaum tertindas. Secara internal juga Barat mampu mengembangkan sistem norma dan nilai beserta perangkat pendukungnya yang menjadi pilar-pilar bagi keunggulan peradaban sekuler Barat. Tentu saja peradaban sekuler Barat memiliki sejumlah kelemahan; dan aspek inilah yang seharusnya dicarikan alternatif di dalam sistem pendidikan kita. Sementara bila kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat tanpa disesuaikan atau diaplikasikan dengan situasi dan kondisi Indonesia maka perkembangan iptek di Indonesia kurang dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia. Kita tidak sepatutnya mengikuti gaya hidup peradaban Barat tanpa mengetahui nilai-nilai atau norma-norma budaya yang melatarbelakanginya, apalagi tanpa tahu kontribusinya bagi kebudayaan kita sendiri.

Dampaknya akan lebih parah lagi bila pendidikan yang diajarkan bersifat teoretis, yaitu mengajarkan konsep-konsep, teori-teori ilmu pengetahuan dan teknologi Barat tanpa disesuaikan atau diaplikasikan dengan situasi dan

kondisi real di Indonesia. Bila pendidikan itu direduksi pada aspek hafalan, maka pendidikan justru akan berarti mengajarkan kekaguman terhadap kemajuan peradaban Barat; dan sebaliknya, menimbulkan perasaan inferior pada diri sendiri karena kita tidak mempunyai kebanggaan terhadap perkembangan iptek sendiri.

Broad Based-Education dan Sistem Pendidikan Indonesia-Sentris

Sistem pendidikan akan mengalami krisis moral bila tidak sesuai dengan budaya suatu bangsa. Karena itu kita perlu menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan budaya bangsa sendiri. Walaupun demikian sistem pendidikan Indonesia-sentris tidak harus tunggal, karena kita juga harus memperhatikan unsur-unsur budaya lokal yang mempunyai sistem nilai yang khas bagi suatu daerah. Dengan demikian, pendekatan BBE dalam sistem pendidikan kita hendaknya dimaknai dari dua sudut pandang, yaitu sebagai usaha Indonesianisasi dan lokalisasi iptek Barat sekaligus.

BBE hendaknya dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu dan filsafat pendidikan sekaligus, sehingga iptek tidak sekedar serangkaian aksioma, konsep dan teori; tetapi juga bagaimana penerapan iptek baik di masyarakat maupun di dunia pendidikan. Kerjasama antara dunia pendidikan dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan iptek di suatu negara, di samping adanya keputusan politis pemerintah. Pengembangan iptek modern harus didukung pengembangan budaya modern, baik di masyarakat maupun dunia pendidikan secara simultan. Dengan demikian, dalam mengembangkan iptek kita tidak bisa memisahkan aspek perangkat keras dengan aspek perangkat lunaknya. Pengembangan iptek juga tidak dapat dilepaskan dari aspek moral karena kita harus menilai iptek yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Pendidikan moral dapat dikembangkan secara lebih mendetail dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu yang menjadikan manusia, baik sebagai individu maupun dalam berbagai jenis pengelompokannya, ke dalam obyek kajiannya. Bahkan beberapa ilmu dapat dikategorikan kedalam pendidikan moral seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Sejarah, dan PPKn. Sasarannya menjadikan

manusia yang berbudi pekerti luhur, sebagai prasyarat agar dapat mengatur kehidupan manusia baik dalam hubungan di antara manusia maupun dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas, demi meraih *salvation* dalam bentuk kesejahteraan, keadilan, dan keamanan.

Hubungan antara pendidikan moral dengan pendidikan keterampilan pernah disinggung oleh Bambang Irianto dalam seminar yang diselenggarakan Wahana Studi Pengembangan Kreativitas (WSPK) Lemlit UNY dengan Direktorat Dikmenum Depdiknas, bahwa konsep penyelenggaraan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*life skill*) harus dihubungkan dengan pendekatan pendidikan berbasis luas BBE, sebagai bentuk layanan pendidikan di sekolah yang tidak lagi bersifat sentralistik (*Kedaulatan Rakyat*, 11 Juni 2002).

Kebijakan pemerintah mengembangkan pendekatan BBE merupakan suatu langkah untuk mengganti sistem pendidikan sentralistik yang teoritis (abstrak). Kebijakan tersebut harus didukung dengan komponen-komponen sistem pendidikan yang memadai. Dalam rangka merealisasikan kebijakan ini, pada tataran sekolah dikembangkan *school based-management* atau manajemen berbasis sekolah (MBS), yang harus diikuti pengembangan suatu kultur sekolah dan hubungan yang sinergis dengan masyarakat. Layanan pendidikan yang diberikan berorientasi kecakapan hidup. Di SMA dilakukan melalui dua program utama:

1. Reorientasi pembelajaran sebagai upaya untuk pembekalan *general life skill* dan *academic skill*.
2. Pembekalan *vocational skill* bagi siswa berpotensi putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.
3. Selain itu, program penunjang, yaitu reformasi di bidang manajemen sekolah, kultur sekolah dan hubungan sinergi dengan masyarakat.

Dua program di SMA tersebut hanya akan membuahkan hasil jika sekolah melakukan reformasi untuk ketiga aspek, yaitu manajemen sekolah, kultur sekolah, dan hubungan sinergi dengan masyarakat. Manajemen pendidikan sentralistik tidak akan menguntungkan untuk penyelenggaraan pendidikan *life skill*, karena sekolah tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan langkah dan kebijakan untuk mewujudkan BBE dalam bentuk

orientasi layanan pendidikan di sekolahnya. Dengan ini sekolah memiliki kesempatan untuk memasukkan unsur lokal di dalam proses pendidikan di sekolah. Kultur sekolah yang kondusif merupakan lahan yang subur bagi berkembangnya pendidikan yang berbudaya. Hal ini menjadi tanggung jawab semua komponen di dalam sekolah tersebut. Masyarakat juga memiliki peranan besar untuk membantu terselenggaranya pendidikan yang berbudaya melalui berbagai usaha kemitraan.

BBE yang difasilitasi dengan Kurikulum 2004 semestinya diikuti suatu revolusi untuk menyusun mata pelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tradisi lokal agar lebih berguna bagi anak didik di dalam mengatasi persoalan kehidupan di daerahnya. Logikanya Kurikulum 2004 memberi kebebasan pada sekolah atau suatu daerah untuk melakukan sendiri evaluasi terhadap bidang studi yang diajarkan. Dalam rangka penyusunan mata pelajaran tersebut kita dapat saja menggunakan konsep dan teori dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat, namun harus diadaptasikan sesuai dengan situasi, kondisi, dan sejarah/tradisi suatu daerah.

Dalam setiap mata pelajaran perlu ditentukan *life skills* yang sesuai dengan situasi, kondisi, sejarah/tradisi daerah tertentu. Reorientasi pembelajaran dapat dilakukan melalui dua macam mekanisme, yaitu:

1. kecakapan hidup dibekalkan secara bersamaan dalam proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran (monolitik), dan
2. kecakapan hidup dibekalkan secara bersamaan dalam proses pembelajaran sejumlah mata pelajaran secara terpadu (terintegrasi).

Life skills dapat diselipkan ke dalam semua matapelajaran karena pendidikan itu menghendaki terjadinya perubahan tingkah laku dalam bentuk kecakapan-kecakapan. Langkah operasionalnya adalah menggunakan pendekatan multidimensional karena problem kehidupan tidak parsial melainkan kompleks. Misalnya, dalam hal melatih siswa mensikapi lingkungannya baik fisik maupun sosial, dapat diberikan lewat pelajaran ekonomi. Dalam hal ini kita telah dijejali dengan prinsip ekonomi, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Prinsip tersebut telah melahirkan eksploitasi, baik terhadap alam maupun sesama manusia oleh Barat sebagai konsekuensi pemikiran sekuler

yang bersifat progresif. Pendidikan hendaknya dapat mencegah tragedi kemanusiaan tersebut, sehingga kita perlu menyelipkan nilai-nilai agama bahwa manusia diutus menjadi *khalifah* di muka bumi disamping sebagai *abdullah*, sehingga manusialah yang berkewajiban untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan di dunia ini. Dengan demikian, implementasi prinsip ekonomi tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

BBE yang mengembangkan *life skills* dalam proses pendidikan dan pengajaran menghendaki kegiatan belajar mengajar (KBM) yang mengembangkan semua domain kemampuan siswa yang meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan kepada aspek kognitif, bahkan lebih sempit lagi pada segi hafalan. Aspek kognitif diperlukan dalam pendidikan dalam rangka mendidik siswa berpikir secara logis dan rasional, di samping untuk melatih siswa menggunakan pendekatan multidimensional dalam program *problem solving* (pemecahan masalah). Pendidikan dalam aspek kognitif merupakan suatu bentuk kegiatan intelektual yang diperlukan siswa supaya dapat mengontrol lingkungannya baik fisik maupun sosial, di samping siswa juga diarahkan supaya dapat hidup selaras dengan lingkungan tersebut.

Memang supaya dapat hidup selaras dengan lingkungannya tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pada pendidikan aspek kognitif, karena hal tersebut sudah menyangkut juga masalah afektif (sikap/penilaian/evaluasi). Hal tersebut menuntut pendidik untuk mengarahkan pelajaran sampai kepada berbagai taraf penilaian karena ilmu tidak pernah bersifat bebas nilai bila sudah sampai kepada tahap implementasi.

Hal ini menyangkut permasalahan filsafat, yang menanyakan kegunaan mempelajari suatu ilmu. Ilmu tidak boleh digunakan bertentangan dengan pertimbangan moral. Dengan demikian, ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan moral, sebagaimana dipahami dari sudut pandang Islam bahwa ilmu dari amal harus menyatu karena ilmu bukan hanya kegiatan intelektual. Sebaliknya, ilmu juga dapat berkembang sebagai hasil dari suatu kegiatan atau keterampilan. Ilmu harus dioperasionalkan dengan pertimbangan pada dua atribut, yaitu amal (perbuatan) dan *fadail*

(keutamaan) (Anees, 2000: 3-4). Pendidikan baik moral maupun keterampilan mutlak memerlukan latihan.

Aspek afektif ini terkait dengan pendidikan moral. Kita mengenal beberapa mata pelajaran yang termasuk ke dalam jenis pendidikan moral ini, seperti Pendidikan Agama, PPKn, dan Pendidikan Budipekerti. Namun, sumber sebenarnya dari pendidikan moral adalah pendidikan agama. Berbagai mata pelajaran moral harus dipandang sebagai pelengkap bagi pendidikan agama, di samping pendidikan moral harus selalu merujuk kepada agama.

Dasar filsafati sistem pendidikan hendaknya menjiwai komponen-komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu para pembuat kebijakan pendidikan baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, kurikulum, guru, siswa, materi pelajaran, dan birokrat pendidikan, di samping perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan. Tanpa memahami dasar filsafati tersebut maka semua yang terlibat dalam dunia pendidikan tidak akan mampu mengembangkan kegiatan yang sinergis secara optimal. Pendidikan tidak dapat dibatasi dalam dinding-dinding sekolah, tetapi berlangsung serentak mengikuti derap langkah pembangunan. Oleh karena itu, krisis multi dimensional yang melanda Indonesia tidak dapat disalahkan pada dunia pendidikan saja; semua komponen bangsa ikut bertanggung jawab.

Pendidikan Keterampilan dalam Bingkai Moralitas

Istilah keterampilan dan kecakapan hidup sering digunakan untuk menunjukkan hal yang sama. Keterampilan sering diartikan secara sempit 'keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk bekerja' (Pardjono, 2002: 2). Keterampilan tidak harus menghasilkan produk (barang-barang), tetapi dapat juga berupa kegiatan yang menggunakan berbagai alat panca indera untuk mendapatkan suatu kecakapan. Berikut pengertian kecakapan yang dimaksud oleh Tim BBE (Irianto, 2002: 5):

adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa

merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi.

Selanjutnya, dijelaskan ada lima aspek yang termasuk dalam kecakapan hidup (*life skills*), yaitu kecakapan untuk mengenali diri (*self awareness*), kemampuan sosial (*interpersonal skills*), kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*), kecakapan akademik (*academic skills*), dan kecakapan vokasional (*vocational skills*). Dimana ketiga keterampilan yang pertama disebut dengan *general life skills* (GLS) dan kedua kecakapan terakhir disebut *specific life skills* (SLS) (Irianto, 2002: 5).

Hubungan antara pendidikan moral dengan GLS, terutama yang berkaitan dengan kecakapan untuk mengenal diri sendiri (*self awareness*), telah dijelaskan Tim BBE (Pardjono, 2002: 2-3) sebagai berikut:

(1) penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat serta warga negara Indonesia, dan (2) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Dari penjelasan di atas nampak bahwa pendidikan moral melatih suatu keterampilan dalam hidup. Keterampilan hidup lebih luas sifatnya daripada keterampilan praktis yang hanya menghasilkan barang. Orang yang dapat membuat suatu barang (menghasilkan uang) belum tentu dapat mencapai kebahagiaan karena dia harus memiliki suatu keterampilan hidup yang lebih umum sifatnya agar dapat mengenal Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan fisik maupun sosial. Dengan demikian, dalam kurikulum perlu diajarkan masalah Tuhan, manusia, dan lingkungan baik fisik maupun sosial.

Sistem pendidikan harus berlandaskan kepada tradisi bangsa untuk menghindari ekses-ekses negatif peradaban Barat tersebut. Tradisi mempunyai peranan yang penting dalam mewariskan dan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa, sehingga bila timbul gejolak dalam proses modernisasi dapat diatasi secara memuaskan. Karena tradisi (budaya) merupakan suatu sistem pengetahuan dari suatu masyarakat yang mencakup

simbol-simbol beserta dengan konsep-konsep epistemologi yang berguna untuk mengintegrasikan berbagai proses modernisasi ke dalam sebuah sistem yang koheren (Kuntowijoyo, 1999a: xi).

Tradisi dimaknai sebagai nilai-nilai bersama dalam suatu masyarakat yang plural. Bersikap positif terhadap tradisi sudah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW yang punya misi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pernyataan tersebut mengandung implikasi kalau tradisi-tradisi yang telah ada sebelum misi kenabian Muhammad SAW sudah memiliki fungsi untuk mengembangkan akhlak yang mulia dan Islam datang untuk menyempurnakannya.

Pendidikan akhlak merupakan inti dari sistem pendidikan Islam, karena manusia dengan kemampuan akal nya dapat menjadi lebih kejam dari binatang. Bila manusia sudah tidak dapat mengontrol nafsu rendah seperti dendam dan amarah. Perubahan akhlak dapat melalui jalan hikmah dan akal (dan hati). Jalan hikmah hanya dialami oleh para Nabi karena mereka menjadi *'alim* (ahli ilmu) tanpa belajar dan dididik melalui bangku sekolah. Manusia biasa dapat mencapai akhlak mulia dengan jalan usaha dan belajar karena dia mempunyai fitrah yang suci. Akal dan hati dapat menjadi sarana untuk perbaikan akhlak bila manusia mau melakukan *mujahadah* (usaha yang sungguh-sungguh untuk mendekati diri kepada Allah) dan *riyadhah* (latihan yang terus-menerus diorientasikan pada ridha Allah), di samping perlunya *uswatun hasanah* (teladan) dari pendidik (Mustaqim, 1999: 93-96).

Menurut Mukti Ali (1971: 5) ada tiga hal yang termasuk penilaian secara moral, yaitu kebebasan memilih, ukuran moral, dan kewajiban. Kebebasan memilih jalan yang baik dan buruk hanya diberikan kepada manusia karena telah diberi akal oleh Tuhan, sehingga dia **berkewajiban** untuk mematuhi hukum-hukum-Nya (**ukuran moral**), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (hukum alam). Supaya dikatakan bermoral, manusia harus menggunakan akal nya untuk mengendalikan dorongan hewaniyah dan menemukannya dalam situasi yang semestinya.

Pendidikan keterampilan juga dapat meningkatkan moralitas seseorang, karena pendidikan moral dapat berhasil dengan baik bila hal itu terkait erat dengan pendidikan keterampilan yang dapat menghasilkan teknologi. Kalau

teknologi yang kita pelajari di sekolah berasal dari teknologi asing, aspek moral dari teknologi juga melekat dengan kebudayaan asing tersebut, karena teknologi merupakan suatu hasil kebudayaan. Teknologi asing tersebut bagi siswa akan menimbulkan rasa kagum terhadap pihak asing itu; sebaliknya akan mengurangi rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai moral bangsa sendiri. Dengan demikian, kita juga harus mengembangkan suatu hasil teknologi yang terkait dengan wawasan kebudayaan. Hal itu telah dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang memperkenalkan filsafat cangkul.

Supaya pengembangan teknologi (sebagai elemen seni) dapat meningkatkan martabat manusia, hal itu harus dikaitkan dengan elemen keberadaan manusia yang lain, yaitu keyakinan (*religion*), filsafat (*philosophy*), dan ilmu pengetahuan (*science*) (Gie, 1998: 39-42). Hal itu perlu dilakukan agar pendidikan keterampilan (teknologi) tidak tercerabut dari spiritualitas; karena, teknologi yang dibangun dengan mengembangkan rasionalitas dan pengalaman empiris terhadap alam, di Barat telah melahirkan filsafat antroposentris yang punya konsekuensi pada sikap *atheis*.

Dengan mengikuti pola tersebut akan menciptakan perasaan religious dan spiritualitas karena ternyata semua jenis ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keterbatasan yang tidak dapat dielakkan. Bahkan, pada ilmu-ilmu alam dan teknologi yang dikatakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi juga tidak lepas dari keterbatasan. Kebenaran-kebenaran ilmu-ilmu alam dan teknologi akan tergoyahkan bila terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang menggantikan dasar-dasar dari teori suatu ilmu.

Sebagai contoh adalah teori Newton yang pada saatnya dianggap sangat akurat, kemudian menjadi memiliki keterbatasan di dalam menjelaskan hukum-hukum alam setelah ditemukannya hukum relativitas oleh Einstein. Revolusi ilmu pengetahuan tersebut terjadi tidak karena para ilmuwan mendasarkan diri pada kerangka teori yang sudah ada, tetapi justru terjadi secara intuitif tanpa disadari. Berikut perkataan Einstein (Mukti Ali, 1971: 13):

Perasaan paling indah dan paling mendalam yang dapat kita alami ialah rasa terharu menghadapi sesuatu yang ghaib. Ia adalah kekuatan semua ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Menginsafi, bahwa yang

tidak dapat kita hampiri itu benar-benar ada, menyatakan dirinya sebagai pengetahuan yang setinggi-tingginya dan sebagai keindahan yang paling cemerlang, yang oleh daya terima kita yang tumpul hanya dapat difahami dalam bentuk-bentuknya yang sangat sederhana-keinsafan itu, perasaan itu, adalah terletak dipusat [sic] keimanan yang sejati. (dialihkan dari ejaan lama ke baru).

Paul Davies (2001) menulis buku *Membaca Pikiran Tuhan: Dasar-Dasar dalam Dunia yang Rasional*, yang menjelaskan keterbatasan ilmu-ilmu modern dalam menjelaskan dunia beserta isinya. Ilmu tidak dapat menjelaskan dari manakah hukum-hukum ilmiah muncul pertama kalinya. Bahkan, dia mempersoalkan asal-usul logika yang di atasnya seluruh penalaran ilmiah di bangun. Hal itu mengarahkan kepada keyakinan akan adanya sesuatu yang ada begitu saja sebagai suatu bentuk eksistensi. Pertanyaan-pertanyaan “tertinggi” tentang eksistensi selalu ada melampaui lingkup ilmu empiris. Perhatikan pernyataannya (Paul Davies, 2001: xii-xiii):
bahwa dunia fisik diletakkan bersama-sama dengan suatu kecerdikan ... sehingga saya tidak dapat menerima dunia fisik ini semata-mata sebagai fakta kasar. Menurut saya, tampaknya mesti ada level penjelasan yang lebih dalam. Apakah orang ingin menamakan level yang lebih dalam itu sebagai “Tuhan” adalah persoalan rasa dan definisi.

Kesimpulan

Sistem pendidikan kita masih belum berhasil meningkatkan kualitas sdm secara optimal. Penyebabnya, sistem pendidikan kita mengekor sistem pendidikan Barat sehingga kita menjadi kehilangan roh budaya sendiri. Konsep-konsep dan teori-teori dari Barat tidak diaplikasikan dalam lingkungan budaya sendiri, sehingga pendidikan tidak pernah mengajak siswa untuk mengatasi persoalan yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, siswa tidak dididik masalah tanggung jawab, disamping siswa mengalami disorientasi nilai, karena pendidikan tidak diarahkan sampai pada taraf afeksi nilai.

BBE yang diluncurkan seiring dengan kebijakan otonomi daerah memberi kesempatan kepada setiap daerah untuk menyusun sistem pendidikan yang tidak sentralistik dan yang sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Sistem pendidikan harus berlandaskan pada filsafati budaya suatu daerah, sebagai suatu sistem pengetahuan dari suatu masyarakat yang mencakup simbol-simbol beserta dengan konsep-konsep epistemologi yang berguna untuk mengintegrasikan berbagai proses modernisasi ke dalam sebuah sistem yang koheren.

Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan moral bila sudah menyangkut masalah aplikasi. Sebagaimana Islam menjadikan pendidikan akhlak sebagai inti dari sistem pendidikan, karena manusia dengan kemampuan akal nya dapat menjadi lebih kejam dari binatang bila manusia sudah tidak dapat mengontrol nafsu rendah nya seperti dendam dan amarah.

Dalam pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya sampai kepada taraf penilaian, baik secara logis maupun etis. Pendidikan keterampilan yang secara sempit diartikan pendidikan untuk menghasilkan barang juga mempunyai implikasi moral, apalagi bila sudah menyangkut masalah aplikasinya. Seharusnya pendidikan keterampilan punya implikasi yang luas pada keterampilan menyikapi hidup dan kehidupan, sehingga dia dapat merasakan keselamatan (*salvation*) baik bagi dirinya maupun lingkungannya.

Daftar Pustaka

- Davies, Paul. 2001. *Membaca Pikiran Tuhan: Dasar-Dasar Ilmiah dalam Dunia yang Rasional*. A.b. Hamzah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadjar, Abdullah. 1991. *Peradaban dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gie, The Liang. 1998. *Philosophy as an Element of Human Existence*. Yogyakarta: PUBIB.

- _____. 1996. *Pengantar Filsafat teknologi*. Yogyakarta: Andi
- Harahap, Nasruddin dkk. (Eds.). 1992. *Dakwah Pembangunan*. Yogyakarta: DPD Golkar Tk. IDIY.
- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: LSIK dan Rajawali Press.
- Irianto, Bambang. Tuntutan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Kecakapan Hidup. Makalah *Seminar Kreativitas dan Kecakapan Hidup*. UNY Yogyakarta 10 Juni 2002.
- Kuntowijoyo. 1999a. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 1999b. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Laksono, P.M. 1985. *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1994. *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah.
- Ali, A. Mukti. 1971. Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional. Dalam A. Mukti Ali *Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dan Pemberantasan Kemiskinan dari Segi Agama Islam*. Yogyakarta: Nida.
- Mustaqim. 1999. Pemikiran tentang Pendidikan Akhlak menurut Imam Ghazali. Dalam Ruswan Thoyib dan Darmuin (Peny.) *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo & Pustaka Pelajar.

Muttaqin, Ahzab. 2002. Pendidikan Terpadu. *Risalah Jum'at*. Edisi 19/XI
19 Juli 2002.

Pardjono. 2002. Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui
Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*). *WUNY*. Edisi Mei 2002.

Shah, A.B. 1986. *Metodologi Ilmu Pengetahuan*. (Alih Bahasa: Hasan
Basari). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zamroni. 2002. Reorientasi Pengajaran Ilmu-ilmu Sosial dalam Kaitannya
dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Makalah *Seminar
Nasional dan Musda HISPISI DIY, FIS UNY*.